

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAMPANYE HITAM  
DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**Ratih Purwaningsih**

**NPM: 1621020575**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2019/2020**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAMPANYE HITAM  
DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019**

**SKRIPSI**

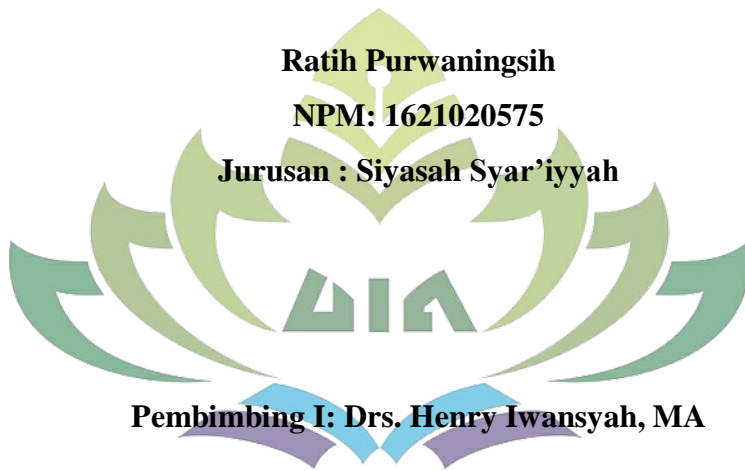
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**Ratih Purwaningsih**

**NPM: 1621020575**

**Jurusan : Siyasah Syar'iyah**



**Pembimbing I: Drs. Henry Iwansyah, MA**

**Pembimbing II: Frenki, M.Si**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2019/2020**

## ABSTRAK

Pemilihan Presiden atau yang biasa disebut dengan pilpres merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan makna yang sebenarnya yaitu pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, tentu terdapat kontestasi politik yang mengharuskan calon pemimpin mempromosikan segala bentuk visi, maupun misinya supaya dapat memenangkan pemilihan umum. Pada pemilihan umum, sering terjadi beberapa masalah, di antaranya adalah kampanye hitam dan ujaran kebencian. Pelaksanaan kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 sangat berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di Negara kita karena jenis pelanggaran ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita-berita propaganda atau kebohongan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pola kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pola kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019. Serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan data yang digunakan adalah data kepustakaan. Data penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi yang ada korelasi dengan judul penelitian, buku teori-teori berkampanye dan berkomunikasi yang baik, seperti buku pengantar hukum pemilihan umum dan sistem politik di Indonesia, jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, dan lain-lain.

Penelitian ini menghasilkan pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019, dengan hukum Islam memandang bahwa pola yang digunakan pada kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 merupakan pola yang melanggar syariat Islam dan dalam fiqh jinayah termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang hukumnya sudah ditentukan oleh penguasa dengan ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Jadi, jelaslah dalam pandangan hukum Islam kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 hukumnya haram karena di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Nama : RATH PURWANINGSIH**  
**NPM : 1621020575**  
**Jurusan : Siyasah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN  
DALAM PILPRES 2019"**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. Henry Iwansyah, MA**  
**NIP. 195812071987031003**

**Pembimbing II**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011002**

**Ketua Jurusan Siyasah**

**Dr. Nurnazli, S.H., Sag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PILPRES 2019"**. Disusun oleh Nama: **RATIH PURWANINGSIH NPM: 1621020575**, Program Studi: **Siyasah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)**

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag M.H. ....

Sekretaris

Rudi Santoso, S.H.I., M.H. ....

Penguji Utama

Dr. H. Jayusman, M.Ag. ....

Penguji Pendamping I

Drs. Henry Iwansyah, M.A. ....

Penguji Pendamping II: Frenki, M.Si. ....

**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Raden Intan Lampung**



.....  
**Khairuddin, M.H.**

**NPM. 1962102199930311002.**



## MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

رَّحِيمٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujarat:12)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdullillahirobbil' alamin.*

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang yang paling saya sayangi:

1. Orang tuaku terutama ibuku yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Nenekku yang selalu mendo'akan dan memberikan pengarahan serta dorongan demi keberhasilan terselesaikannya karya ilmiah ini.
3. Bibiku dan pamanku yang telah memberikan dukungan dan doanya.
4. Semua keluargaku yang selalu memberikan semangat dan menanti keberhasilanku.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasa Kelas Internasional angkatan 2016 yang saling memberikan motivasi dan masukan.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ratih Purwaningsih dilahirkan di Karawang pada Tanggal 03 April 1998, anak kesatu dari satu bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama Unam dan Ibu bernama Hartati. Penulis mengawali pendidikan di SD Generasi Muda Kecamatan Teluk Betung Selatang Kota Bandar Lampung. Dilanjutkan Sekolah MTS Daar El Ma'arif Pandeglang Banten lulus tahun 2013. Dilanjutkan Sekolah MA Daar El Ma'arif Pandeglang Banten dan lulus tahun 2016.

Pada Tahun 2016 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Strata satu (S1) Jurusan Siyasah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.”



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul Skripsi ini “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Presiden 2019.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah), pada program strata satu ( S1 ) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Nurnazli, SH, S.Ag. MH. selaku Ketua Jurusan Siyash

4. Drs. Henry Iwansyah, MA. selaku Pembimbing I
5. Frenki, M.Si. selaku Pembimbing II
6. Seluruh Dosen, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, dan memberi masukan selama penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tuaku, dan seluruh keluarga tercintaku terima kasih atas do'a dan dukungannya.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2016, Sari Asmiatien, Putri Tania, Julia Hernida, M. Sofyan Yusuf, Ramada Hendrian dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan.
9. Sahabat terbaikku Amaliatu Solihah, yang selalu memberikan semangat.
10. Seluruh orang-orang yang selalu menyemangati, mendukung, dan mendoakan.



Bandar Lampung,

Penulis

Ratih Purwaningsih



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Rumusan Masalah .....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	11
H. Tinjauan Pustaka.....	11
I. Metode Penelitian.....	12

### **BAB II KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM ISLAM**

A. Pengertian Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian .....	18
B. Dalil-dalil Tentang Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian .....	24
C. Sejarah Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian.....	27
D. Pendapat Ulama Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian .....	34

### **BAB III KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PILPRES 2019**

A. Dasar Hukum Larangan Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.....	38
B. Bentuk-bentuk Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019 .....	42
C. Mekanisme Penyebaran Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.....	56
D. Penanggulangan Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.....	69

### **BAB IV KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PILPRES 2019 MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Pola Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.....	74
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.....	77

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum penulis memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memberikan paparan mengenai maksud penulisan judul ini untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang digunakan. Adapun istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019” sebagai berikut :

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Kampanye hitam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *black campaign* yang artinya melakukan kampanye dengan cara-cara yang tidak sehat seperti menebar keburukan pihak lain. Kampanye hitam adalah kampanye yang dilakukan dengan cara menjatuhkan pribadi pihak lawan

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1987), h. 6.

supaya pihak lawan atau seorang politikus tersebut tidak disenangi oleh banyak orang khususnya para pemilih.<sup>2</sup>

Ujaran Kebencian atau *hate speech* adalah sebuah perbuatan perkataan yang dilarang karena dapat menimbulkan adanya sebuah tindakan yang keji dan sikap negatif terhadap berprasangka, yang timbul dari pelaku ataupun korban.<sup>3</sup>

Pilpres 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul yang penulis teliti adalah sebuah penelitian yang menganalisis tentang pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Berikut beberapa alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Alasan yang mendukung penulis memilih judul ini adalah bahwa pelaksanaan pilpres 2019 tercemari dengan adanya oknum yang membuat

---

<sup>2</sup>Yanti Setianti, *Kampanye dalam Merubah Sikap Khalayak*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 4.

<sup>3</sup>Sri Mawarti, "Media Komunikasi Umat Beragama", *Jurnal Fenomena Hate Speech* Vol. 10 No.1 (2018), h. 3-4 (On-line). Tersedia di <https://docplayer.info/129243906-febomena-hate-speech-dampak-ujaran-kebencian-sri-mawarti-html> (diakses pada 23 Juli 2019, Pukul 18:24 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>4</sup>Wikipedia, "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019", (On-line) tersedia di <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemilihan-umum-presiden-Indonesia-2019/> (20-08-19)



suasana demokrasi terkesan negatif dengan melancarkan kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

## 2. Alasan Subjektif

Alasan lain yang mendorong dipilihnya judul ini adalah sebagai bentuk implementasi untuk semua pihak dalam mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

Penelitian ini tidak ada yang membahas khususnya di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan peneliti ini diajukan sebagai syarat penulis menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Siyash Syar'iiyah (SS).

## C. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Presiden atau yang lebih kita kenal dengan pilpres merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan makna yang sebenarnya yaitu pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini, tentu terdapat kontestasi politik yang mengharuskan calon pemimpin mempromosikan segala bentuk visi, maupun misinya supaya dapat memenangkan pemilihan umum.

Visi maupun misi tersebut dapat disampaikan pada saat masa kampanye calon pemimpin. Hal inilah yang biasanya menimbulkan reaksi berlebihan dari kalangan masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap kampanye tersebut.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pada pemilihan umum, sering terjadi beberapa masalah terlebih mengenai kampanye, salah satunya adalah kampanye hitam. Pelaksanaan kampanye hitam sangat berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di Negara kita karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita-berita propaganda atau kebohongan.<sup>5</sup>

Sebelum adanya amandemen, *black campaign* yang juga dikenal sebagai *whispering campaign* menggunakan metode desas-desus dari mulut ke mulut, maka dewasa ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi dan multimedia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Agung Pandu Winasis, "Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi di Era Disrupsi Teknologi Informasi", Jurnal *Unnes*, Vol.4 No.3 (2018), h. 1129 (On-Line). Tersedia di <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh> (diakses pada 23 Juli 2019, pukul 18:47), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>6</sup>Tegal Damai, "*Penyebab Terjadinya Kampanye Hitam (Black Campaign)*", (On-line) tersedia di <https://tegaldamai.wordpress.com/2018/03/08/penyebab-terjadinya-kampanye-hitam-black-campaign-2/> (12-12-18)



Kampanye hitam (*black campaign*) adalah kampanye yang penggunaannya menggunakan cara yang negatif, dengan menyebarkan berita yang belum benar adanya supaya masyarakat menganggapnya tidak baik.

Pendapat seperti inilah, yang biasanya memicu masyarakat untuk mempercayai berita bohong dan juga mempermudah pihak lain dalam menyebarkan ujaran kebencian.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah menetapkan hal-hal yang dilarang dalam kampanye khususnya dalam pasal 280 ayat (1) disebutkan bahwa larangan kampanye bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu, di antaranya:

*Pertama*, dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Kedua*, dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. *Keempat*, dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

*Kelima*, dilarang mengganggu ketertiban umum. *Keenam*, dilarang mengancam atau melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.

*Ketujuh*, dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. *Kedelapan*, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. *Kesembilan*, dilarang menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. *Kesepuluh*, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Sepuluh aturan tersebut pada umumnya meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dalam pemilu apabila tidak ada larangan yang mempertegasnya. Jika kita teliti pada sepuluh larangan tersebut, terdapat dua larangan yang berhubungan dengan adanya kampanye hitam dan juga penyebaran berita bohong yaitu dalam larangan ketiga dan keempat.

Menghina serta menghasut dan mengadu domba merupakan salah satu pelaksanaan dari kampanye hitam dan ujaran kebencian. Pelaksanaan tersebut sudah sangat jelas dilarang karena akan merusak ketertiban dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, bentuk lain dari kampanye hitam ialah menyebarkan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan.

Menurut Islam, menyebarkan gosip atau isu-isu disebut sebagai perbuatan fitnah yang mana akan melahirkan perbuatan saling menggunjing atau berburuk sangka satu sama lain. Untuk itu, Al-Qur'an pun menjelaskan secara gamblang seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hujarat:12)

Gossip atau isu yang dapat menjatuhkan lawan biasanya berupa ujaran kebencian yang ditujukan agar lawan tidak mendapat dukungan. Media massa menjadi tempat paling berpengaruh dalam munculnya ujaran kebencian dan juga kampanye hitam yang terjadi dalam pilpres 2019. Karena dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa “Pemberitaan kampanye pemilu dilakukan oleh media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dengan siaran langsung atau siaran tunda.” Dengan adanya pemberitaan kampanye masyarakat menjadi semakin mengerti tentang visi, maupun misi setiap calon presiden.

Namun, negatifnya menimbulkan terciptanya berita bohong dan ujaran kebencian yang tersebar luas di media sosial. Sebagai contoh, sebelum pesta demokrasi dilakukan, telah banyak tersebar video ataupun tulisan yang menjelekkan para calon pemimpin dan kebenarannya belum terbukti baik secara teknis maupun secara hukum.



Dalam hal ini, banyak masyarakat yang menjadi dilema untuk menentukan siapa pemimpin yang pantas untuk memimpin negeri ini. Dan tak sedikit pula masyarakat yang ikut serta dalam penyebaran ujaran kebencian dan membuat suasana pemilu semakin tercemari.

Kampanye hitam dan ujaran kebencian yang terjadi dalam Pilpres 2019 banyak dialami oleh masing-masing paslon. Pada Paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'aruf dihadapkan pada isu yang dibuat oleh ibu-ibu dari Karawang yang mengatakan bahwa, jika Jokowi terpilih tidak akan ada suara adzan dan diperbolehkan menikah sesama jenis. Sedangkan, yang dialami oleh Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi dihadapkan isu yang mengatakan bahwa Prabowo adalah keturunan nasrani, yang mana tersebar video yang memperlihatkan Prabowo sedang berdoa bersama dengan jema'at gereja.

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan dalam pasal 45A ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan perspektif Islam, dianjurkan untuk selalu meneliti semua berita yang diterima agar berita tersebut tidak menjadi masalah dalam

berlangsungnya kehidupan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujarat:6 berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِبَيِّنٰتٍ فَتَيَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوْا عَلٰٓى  
مَا فَعَلْتُمْ تٰدِيۡمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mengenai kampanye hitam serta ujaran kebencian dalam pilpres 2019, penulis terdorong untuk menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian Dalam Pemilihan Presiden 2019”**

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian untuk memilih data yang cocok dan tidak cocok. Pembatasan di penelitian ini lebih berdasarkan pada tingkat kepentingan dari suatu masalah dalam penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Presiden 2019” yang objek utamanya adalah Pilpres 2019.

### **E. Rumusan Masalah**

Setelah melihat latar belakang di atas, maka yang akan penulis teliti adalah Pandangan Hukum Islam terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019. Adapun beberapa rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pola kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019 ?

### **F. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang pola kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

Adapun kegunaan dari hasil bahasan penelitian ini, adalah :

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Islam, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat.

2. Kegunaan praktis yaitu diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam.

### **G. Signifikasi Penulisan**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019.
- b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019.
- c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka.
- d. Dapat menjadikan dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan tersebut.

### **H. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini dimaksud guna memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti, dan bertujuan agar menghindari plagiasi.



Berikut penjabaran beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek yang akan diteliti penulis, diantaranya:

*Pertama*, Megi Ardiansyah, 2017, penelitian ini berjudul Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU). Penelitian ini membahas mengenai penggunaan media elektronik dalam kampanye pilkada prespektif etika politik Islam. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki penulis.<sup>7</sup>

*Kedua*, Annisa Ulfa Haryati, 2017, penelitian ini berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang *Hate Speech*. Penelitian ini membahas penerapan UU ITE No. 19 tentang hate speech bisa sejalan dengan hukum Islam agar dapat meminimalkan kasus-kasus *hate speech*. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif

---

<sup>7</sup>Megi Ardiansyah, “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)” (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 22.

analitis yang bertujuan supaya bisa digambarkan mengenai penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech*.<sup>8</sup>

Ketiga, Muhammad Fauzi Nasution, 2017, penelitian ini berjudul Etika Kampanye dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fikih Siyasah. Penelitian ini membahas etika berkampanye supaya bisa sejalan dengan hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Allah SWT. penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan.<sup>9</sup>

## I. Metode Penelitian

Supaya mendapatkan penelitian yang tepat, maka ada beberapa hal yang penulis lakukan supaya mendapatkan data yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka penulis perlu menentukan cara atau metode yang dianggap penulis paling baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara baik dan optimal. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca

---

<sup>8</sup>Annisa Ulfa Haryati, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang *Hate Speech*” (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 11.

<sup>9</sup>Muhammad Fauzi Nasution, “Etika Kampanye dalam Penyelenggaraan Pilkada Menurut Fikih Siyasah” (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), h. 20.

buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan materi yang dibahas.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi, menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan.<sup>11</sup> Penelitian ini akan penulis jelaskan mengenai pandangan hukum Islam terhadap kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>12</sup> Penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>13</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari buku kepustakaan, sedangkan untuk teori dalam

<sup>10</sup>Etta Mamang Sangaji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21

<sup>11</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 10.

<sup>12</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 2006), h. 129.

<sup>13</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, dan Hadist, serta buku-buku Islam yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>14</sup> Pada penelitian ini dokumen yang diperlukan untuk memperoleh data yaitu buku literatur hukum, jurnal penelitian, laporan penelitian hukum, laporan media cetak dan media elektronik.

### 3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.<sup>15</sup>

Pada pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian tersebut. Kemudian, dianalisis dengan menggunakan dasar hukum Islam yang ditambah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

#### b. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 94.

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta 2009), h. 402.



Pengolahan data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian.

#### 1) Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literature, buku-buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

### 4. Analisi Data

Analisi data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang digunakan dengan cara menguraikan data dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.<sup>16</sup>

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai bentuk untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir

---

<sup>16</sup>Soejano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 112.

induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.



## BAB II

### KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian

##### 1. Pengertian Kampanye Hitam

Menurut salah satu ilmuwan politik, *a campaign is a coordinated use of different methods of communication aimed at focusing attention on a particular problem and its solution over a periode of time*. Kampanye merupakan koordinasi dari berbagai perbedaan metode komunikasi yang memfokuskan perhatian pada permasalahan tertentu dan sekaligus cara pemecahannya dalam kurun waktu tertentu.<sup>17</sup>

Sedangkan *black campaign* atau kampanye hitam ialah dimaknai sebagai jalan untuk mendapatkan suatu jabatan, seperti jabatan yang dianggap tinggi dengan cara-cara yang tidak sehat.<sup>18</sup>

Kampanye merupakan suatu jalan yang dilakukan oleh tim kampanye dengan tujuan tercapainya visi dan misi seorang kandidat. Pengertian lain kampanye ialah berkampanye dengan jujur atau mematuhi berbagai perbuatan dan aturan dalam kampanye dengan menyampaikan

---

<sup>17</sup>Rosadi Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23.

<sup>18</sup>Natapraja, "Analisis Black Campaign (Kampanye Hitam)", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No.2 (2016), h. 185 (On-Line). Tersedia di <https://journal.uny.ac.id/index.php> (diakses pada 25 Agustus 2019, pukul 12:02), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

berita yang benar adanya dan tidak berbuat curang demi kepentingan golongan atau pribadi. Kampanye berusaha mendorong pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada calon atau kandidat. Cara agar calon atau kandidat meraih sebanyak mungkin suara ialah dengan melakukan smart campaign atau setidaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Model kampanye terbaik ialah sepanjang usia dengan asumsi menjadi orang baik, sehingga orang tersebut akan dipercaya ketika membutuhkan dukungan.
- b. Kampanye terbaik ialah menyampaikan cira sosial dan figure diri di depan publik supaya publik akan mengertikarakter orang tersebut dan kalau perlu sampai sejelas-jelasnya.
- c. Praktek kampanye terbaik ialah melalui ajakan atau bujukan yang dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat dari satu orang ke orang lain. Strategi ini juga harus seimbang dengan penguatan strategi serta yang lainnya serta harus seimbang dengan rasiobalisasi.<sup>19</sup>

Menurut Hukum Islam, kampanye dapat diartikan sebagai dakwah. Secara bahasa dakwah berasal dari bahasa Arab yang artinya ajakan.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kampanye hitam merupakan bagian dari problematika pelaksanaan kampanye Pemilu

<sup>19</sup>Nur Hidayat Sardini, *Rasionalitas Pilkada*, (Jakarta: Suara merdeka, 2015), h. 3.

<sup>20</sup>Pius A Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabya: Arkola 1994), h. 626.



dikarenakan pelaksanaan kampanye hitam tidak didasari dengan moral yang baik dan tidak mengajak atau memanggil dengan proses yang benar.

Jadi, dapat disimpulkan kampanye hitam lebih mengarah dan cenderung menimbulkan fitnah serta berisi kebohongan atau tuduhan yang tidak ada bukti. Kampanye yang seperti inilah yang dapat diberikan hukuman dan sanksi apabila tim kampanye terbukti melakukan kampanye jenis ini.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) N0. 7 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu<sup>21</sup>:

- a. Debat publik/debat terbuka antar calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio dan televisi
- g. Pertemuan terbatas
- h. Rapat umum
- i. Tatap muka dan dialog

Selain itu terdapat pula jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu<sup>22</sup>:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.627.

a. *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya.

b. *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

c. *Ideologically Or Cause Oriented Campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns* (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yg terkait.

Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (*attacking campaign*)<sup>23</sup>:

- a. Kampanye Negatif, menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan.

---

<sup>22</sup> Rosadi Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.

<sup>23</sup> *Ibid*, h.31

- b. Kampanye hitam (*Black campaign*), Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk menjatuhkan lawan politik.

Berdasarkan berbagai jenis kampanye diperlukan sejumlah bentuk media, berikut beberapa media yang digunakan dalam kampanye. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak bentuk dan jenis kampanye. Semua bentuk dan jenis kampanye ini membutuhkan media kampanye sebagai corong untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Beberapa media kampanye yang umum digunakan adalah<sup>24</sup>:

- a. Media Elektronik (televisi, radio)
- b. Media Cetak (koran, tabloid, majalah)
- c. Media Komunikasi Kelompok (pameran, seminar, diskusi panel)
- d. Media Luar-Ruangan (poster, *banner*, *billboard*, papan nama)
- e. Media Digital (Website, media sosial, email, aplikasi *chatting*, dan lain-lain).

## 2. Pengertian Ujaran Kebencian

Menurut *Council of Europe*, *hate speech* atau ujaran kebencian dipahami sebagai “semua bentuk ekspresi yang menyebar, menghasut, mempromosikan atau membenarkan kebencian rasial, xenophobia, anti-semitisme atau lainnya dalam bentuk kebencian berdasarkan intoleransi, termasuk : intoleransi nasionalisme agresif dan etnosentrisme,

---

<sup>24</sup> Nur Hidayat Sardini, *Rasionalitas Pilkada*, (Jakarta: Suara merdeka, 2015), h. 10.

diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migran dan orang-orang asal imigran.”

Sedangkan *hate speech* atau ujaran kebencian dalam Islam dapat diartikan sebagai fitnah. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab, asal katanya adalah *fatana* dalam bentuk fi’il yang artinya adalah cobaan dan ujian.<sup>25</sup> Ibrahim al-Abyari dalam *Al-Mu’jam al-Qur’ani* menerangkan bahwa, fitnah berarti menguji dengan api, cobaan, kegelisahan, dan kekacauan pikiran, azab, dan kesesatan.<sup>26</sup>

Abdul Hay al-Farmawi, yang merupakan seorang guru besar tafsir Universitas Al-Azhar menjelaskan bahwa asal kata fitnah adalah memasukan emas ke dalam api untuk memisahkan yang asli dari yang palsu. Maka, fitnah adalah sebuah proses pembakaran dengan api.<sup>27</sup>

Sedangkan, menurut pasal 28 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Pasal 45 ayat 2 UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)

---

<sup>25</sup>Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhatasar as-Shihah*, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, 2005), h. 430.

<sup>26</sup>Ibnu Manzhur, *Lisna al-‘Arab*, (Dar al-Ma’arif, t.t), h. 3344.

<sup>27</sup>Abdul Hay al-Farmawi, *Al-Mausu’ah al-Quraniah al-Mutakhassisah*, (Kairo: Al-Majlis al-‘Ala li al-Syu’un al-Islamiyah, 2009), h.757.

atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Secara garis besar, ujaran kebencian merupakan salah satu perbuatan fitnah yang merusak dan dapat dikenakan hukuman atau sanksi baik secara hukum umum maupun secara hukum Islam.

## **B. Dalil-dalil Tentang Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa kampanye hitam dan ujaran kebencian telah dilarang oleh Undang-Undang dan memiliki sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Begitupun yang telah ditetapkan dalam Islam, kampanye hitam dan ujaran kebencian merupakan perbuatan yang tercela serta dzolim karena mengarah pada perbuatan fitnah, penghinaan, dan pencermaran nama baik.

Hukum Islam mengharamkan perbuatan tercela seperti megumpat, mencaci maki, menebar kebencian, serta menyebarkan aib orang lain. Islam datang untuk merombak sistem kehidupan masyarakat pra-Islam, untuk itu Islam membawa sunnah yang berbeda dari sunnah-sunnah sebelumnya.<sup>28</sup> Islam juga sangat membenci orang-orang yang melakukan dosa tersebut, dan mengancam mereka dengan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti dan

---

<sup>28</sup>Alamsyah, “Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII No.3 (2015), h. 481 (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/201> (diakses pada 27 Agustus 2019, pukul 11:55 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang *fasik*. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qalam ayat 10-12:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa”.

Firman Allah SWT. tersebut menerangkan perbuatan hina seperti fitnah dapat menghalangi perbuatan baik dan apabila melampaui apa yang telah dibataskan maka banyaklah dosa bagi siapa saja yang melakukannya. Jelaslah bahwa perbuatan fitnah merupakan perbuatan yang sangatlah ditentang oleh Allah SWT<sup>29</sup>.

Islam adalah agama yang sangat mengharamkan perbuatan menggunjing, dan juga menebar kebencian, Allah SWT. sangat membenci dan juga menentang perbuatan tersebut dan menyebutnya sebagai sifat dan perbuatan tidak bermoral. Nabi SAW. bersabda:

أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِشَرِّ أَرْكَامٍ؟” قَالُوا: بَلَى. قَالَ: الْمَشَاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمَفْسُدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبِرَاءَ ( العنت “ . (أخرجه البخاري في الأدب المفرد

Artinya: “Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Mereka menjawab : Ya, kami mau. Nabi mengatakan : ialah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari

<sup>29</sup>Muhammad Abi Bakr ar-Razi, *Mukhatasar as-Shihah*, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, 2005), h. 432.

*kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad)*

Kampanye hitam dan ujaran kebencian yang dikenal juga sebagai fitnah dalam Islam, merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk mencemarkan nama baik seseorang.<sup>30</sup> Dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan ini ialah keluarnya penyakit syirik, kikir, angkuh, dan dapat menyebabkan penderitaan yang lainnya.

Perbuatan fitnah juga akan membuat hidup menyesal, oleh sebab itu berhati-hatilah untuk mendengarkan kabar atau berita jangan sampai mempercayai adanya fitnah. Allah SWT. telah berfirman dalam Q.S Al-Hujarat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ayat ini merupakan penjelasan bagi kita, apabila mendengarkan suatu berita maka periksalah terlebih dahulu karena jika berita tersebut termasuk ke dalam fitnah maka akan dimasukkan dalam katagori dosa besar.

Selain itu juga, apabila kita melakukan perbuatan fitnah maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang tidak akan diberikan syafa’at oleh Nabi

---

<sup>30</sup>Akhmad Danial, *Iklan Politik TV Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), h. 45.

SAW. dan juga termasuk ke dalam golongan yang akan memasuki neraka jahannam.

Maka jelaslah bahwa perbuatan fitnah sangat dilarang oleh Islam, dan bukan termasuk ke dalam perbuatan yang patut diikuti dan ditiru oleh orang banyak. Termasuk juga kampanye hitam dan ujaran kebencian bukanlah perbuatan yang patut ditiru, selain akan dikenakan hukum Negara perbuatan ini juga akan membuat pelakunya mendapat dosa besar yang akan ditanggung di akhirat kelak.

### C. Sejarah Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian

Berdasarkan Hukum Islam, Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian merupakan bagian dari perbuatan fitnah. Sejarah terjadinya fitnah pada zaman Rasulullah SAW. ditandai dengan turunnya Hadist Ifki<sup>31</sup>.

Kisah ini bermula ketika istri Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mendapat giliran menyertai beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam perang Muraishi’ ini yaitu ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma kehilangan kalungnya saat perjalanan menuju Madinah pasca peperangan.

Dalam perjalanan pulang itu, mereka beristirahat di sebuah tempat. Saat itu ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma keluar dari sekedupnya (semacam tandu yang berada di atas punggung unta) untuk suatu keperluan. Ketika kembali ke sekedupnya, beliau Radhiyallahu anhuma kehilangan kalung,

---

<sup>31</sup> Abdul Hay al-Farmawi, *Al-Mausu'ah al-Quraniah al-Mutakhassisah*, (Kairo: Al-Majlis al-‘Ala li al-Syu’un al-Islamiah, 2009), h.758.

akhirnya beliau Radhiyallahu anhuma keluar lagi untuk mencarinya. Saat kembali untuk yang kedua kali inilah, beliau Radhiyallahu anhuma kehilangan rombongan, karena Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan pasukan beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berangkat. Para shahabat yang menaikkan sekedup itu ke punggung unta tidak menyadari bahwa ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma tidak ada di dalamnya karena dia masih ringan.<sup>32</sup>

Beliau Radhiyallahu anhuma tentu gelisah karena ditinggal rombongan, namun beliau Radhiyallahu anhuma tidak kehilangan akal. Beliau Radhiyallahu anhuma tetap menunggu di tempat semula, dengan harapan rombongan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam segera menyadari ketiadaannya dan kembali mencarinya di tempat mereka istirahat. Akan tetapi yang ditunggu tidak kunjung datang, sampai akhirnya salah shahabat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bernama Shafwân bin al-Mu’atthal as-Sulami lewat di tempat itu dan mengenali ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma , karena Shafwân Radhiyallahu anhu pernah melihat beliau Radhiyallahu anhuma saat sebelum hijab diwajibkan. Shafwân Radhiyallahu anhu kemudian membantu beliau Radhiyallahu anhuma . Shafwân menidurkan untanya agar ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma bisa naik unta sementara Shafwân menuntunnya sampai ke Madinah. Sejak bertemu dan selama perjalanan, Shafwân Radhiyallahu anhu tidak pernah mengucapkan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 759.

kalimat apapun kepada ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma , selain ucapan Innalillah wa Inna Ilaihi Raji’un karena kaget saat mengetahui ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma tertinggal.

Peristiwa ini dimanfaatkan oleh kaum munafik. Mereka membubuhi kisah ini dengan berbagai cerita bohong. Diantara yang sangat berantusias menyebarkan cerita bohong dan keji itu adalah Abdullah bin Ubay Ibnu Salul. Cerita bohong itu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, sehingga ada beberapa shahabat yang terfitnah dan tanpa disadari ikut andil dalam menyebarkan berita ini. Mereka adalah Mithah bin Utsâsah (sepupu Abu Bakr ash-Shiddiq Radhiyallahu anhu), Hassân bin Tsâbit dan Hamnah bintu Jahsy Radhiyallahu anhum.

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam sedih dengan berita yang tersebar, bukan karena meragukan kesetiaan istri beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam percaya Aisyah Radhiyallahu anhuma dan Shafwân Radhiyallahu anhu tidak seperti yang digunjingkan. Berita yang sangat menyakiti hati Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ini memantik kemarahan para shahabat dan hampir saja menyulut pertikaian diantara kaum Muslimin.

Sebagai respon dari berita buruk ini, Sa’ad bin Mu’âdz Radhiyallahu anhu menyatakan kesiapannya untuk membunuh kaum Aus yang terlibat dalam penyebaran berita dusta ini, sementara Sa’ad bin Ubâdah Radhiyallahu anhu tidak setuju dengan sikap Sa’ad bin Mu’adz ini, karena diantara yang



tertuduh terlibat dalam penyebaran berita ini berasal dari kaum Sa'ad bin Ubâdah Radhiyallahu anhu. Hampir saja kekacauan yang diinginkan kaum munafik menjadi nyata, namun dengan petunjuk dari Allâh Azza wa Jalla , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tampil menyelesaikan permasalahan ini dan berhasil meredam api kemarahan. Sehingga kaum munafik harus menelan pil pahit kegagalan untuk kesekian kalinya.

Awalnya, Aisyah Radhiyallahu anhuma tidak tahu kalau banyak orang yang sedang menggunjing beliau Radhiyallahu anhuma. Beliau Radhiyallahu anhuma menyadari hal itu, ketika jatuh sakit dan meminta ijin kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tua beliau yaitu Abu Bakar Radhiyalla anhu. Betapa sakit hati beliau Radhiyallahu anhuma mendengarnya. Sejak saat itu, beliau Radhiyallahu anhuma susah bahkan tidak bisa tidur. Beliau Radhiyallahu anhuma berharap dan memohon agar Allâh Azza wa Jalla memberitahukan kepada nabi-Nya melalui mimpi perihal permasalahan yang sedang dipergunjingkan halayak ramai. Beliau Radhiyallahu anhuma merasa tidak pantas menjadi penyebab turunnya wahyu. Oleh karenanya beliau Radhiyallahu anhuma berharap ada pemberitahuan lewat mimpi kepada nabi-Nya.

Sebulan penuh, ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha merasakan kepedihan dan juga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akibat ulah orang-orang munafik

ini. Sampai akhirnya, Allah ta'ala menurunkan sepuluh ayat Al- Qur'an perihal berita dusta ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلَّٰلٌ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, maka baginya azab yang besar”. (QS. An-Nur : 11)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢)

Artinya: “Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang Mukminin dan Mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) mengatakan, “Ini adalah berita bohong yang nyata.” (QS. An-Nur : 12)

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكََاذِبُونَ (١٣)

Artinya: “Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah orang-orang yang dusta”. (QS. An-Nur : 13)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤)

Artinya: “Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, akibat pembicaraan kamu tentang berita bohong itu”. (QS. An-Nur : 14)

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥)

Artinya: “(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allâh adalah besar”. (QS. An-Nur : 15)

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦)

Artinya: “Dan Mengapa kamu diwaktu mendengar berita bohong itu tidak mengatakan, “Kita sama sekali tidak pantas untuk mengucapkan ini, Maha Suci Engkau (Ya Rabb kami), ini adalah dusta yang besar.” (QS. An-Nur : 16)

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧)

Artinya: “Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur : 17)

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨)

Artinya: “Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nur : 18)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allâh mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”. (QS. An-Nur : 19)

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠)

Artinya: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). (QS. An-Nur : 20)

Dengan turunnya ayat ini, maka permasalahan ini pun menjadi jelas. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Ummul Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma merasa lega. Begitu juga yang dirasakan oleh kaum Muslimin, namun mereka merasa berang dengan orang-orang yang ikut andil dalam mencoreng nama baik ummul Mukminin. Abu Bakar as-shiddiq Radhiyallahu anhu tersulut emosinya ketika tahu bahwa Misthah bin Utsâtsah, sepupu beliau Radhiyallahu anhu yang selama ini dibantu ekonominya ternyata ikut andil dalam menyebarkan berita yang telah melukai hati Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan seluruh kaum Muslimin ini. Bahkan sampai beliau Radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak akan membantunya lagi. Lalu turunlah firman Allâh Azza wa Jalla :



*Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S An-Nûr/24: 22)*

Akhirnya Abu Bakar Radhiyallahu anhu membantu Misthah kembali karena mengharap ampunan dari Allâh Azza wa Jalla. Dalam ayat-ayat di atas, Allâh Azza wa Jalla mencela mereka yang terperangkap dalam jebakan orang-orang munafik dan memuji kaum Mukminin yang tidak termakan isu

ini dan menyikapinya dengan bijak sembari menyakini kedustaan berita ini. Diantara yang tersanjung dengan ayat ini adalah Abu Ayyub al-Anshari Radhiyallahu anhu. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadits yang memberitakan bahwa salah shahabat Rasûlullâh dari kaum Anshar saat mendengar berita ini, beliau Radhiyallahu anhu mengatakan : “Kita sama sekali tidak pantas untuk mengucapkan ini, Maha Suci Engkau (Ya Rabb kami), ini adalah dusta yang besar” (HR. Bukhari, al Fath, 28/110, no. 7370)

Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa orang ini adalah Abu Ayyub Radhiyallahu anhu. Setelah perkara ini menjadi jelas, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian menuntaskannya dengan memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat.

#### **D. Pendapat Ulama Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian**

Fenomena kampanye hitam dan ujaran kebencian cukup erat kaitannya pada pemilihan umum, dalam fikih siyasah, istilah pemilihan umum dikenal dengan *Intikhabah al-‘ammah*. *Intikhabah* merupakan *jama’ muannas salim* yang berasal dari kata *Intakhaba yantakhabu* yang artinya memilih.<sup>33</sup>

Maka dari itu, untuk memilih seorang pemimpin sangat dianjurkan tidak memilih pemimpin yang terbukti melakukan pelanggaran seperti

---

<sup>33</sup> Muhammad Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid I, (Beirut: Dar Shadir, t.t), h. 751.



kampanye hitam dan ujaran kebencian. Para pakar siyasah menyifatkan kampanye dengan beberapa prinsip, menurut mereka antara lain : <sup>34</sup>

1). Prinsip jujur dan benar

Prinsip ini merujuk pada ketentuan syari'ah yang menganjurkan pada semua muslim harus berkata jujur dan benar. Ini sama halnya dengan firman Allah dalam Q.S Qaf ayat 18 :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

Artinya : *“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir”*.

2). Tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan

Ada dua poin yang merujuk pada prinsip ini, diantaranya sabda Rasulullah SAW yang artinya *“Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu.”*

Berdasarkan pada kedua poin tersebut, jelaslah bahwa perkara politik dan segala polemiknya yang tidak berazas dan juga semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari'ah.

Perbuatan menawarkan diri supaya bisa menjadi pemimpin, terdapat dalam Al-Qur'an mengenai perkataan Yusuf as. dalam Q.s Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ﴿٥٥﴾

<sup>34</sup>Dr. Lukman Thaib, Politik Menurut Prespektif Islam, (Malaysia: Synergymate Sdn, Bhd, 1998), h. 135.

Artinya: *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi, ayat tersebut merupakan ayat yang membolehkan seseorang untuk menyanjung dirinya sendiri dengan berdasarkan fakta yang sebenarnya apabila ia tidak terlalu dikenal. Begitu juga sama halnya dengan meminta jabatan apabila tidak ada yang mau mencalonkan.<sup>35</sup> Kekuasaan atau jabatan tersebut dapat diminta apabila ada orang kafir dan zhalim yang menginginkan kekuasaan.

Oleh sebab itu, apabila terdapat seseorang yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin dan juga mampu berbuat adil serta mampu dalam mengamalkan hukum Allah, maka orang tersebut layak mencalonkan menjadi pemimpin.

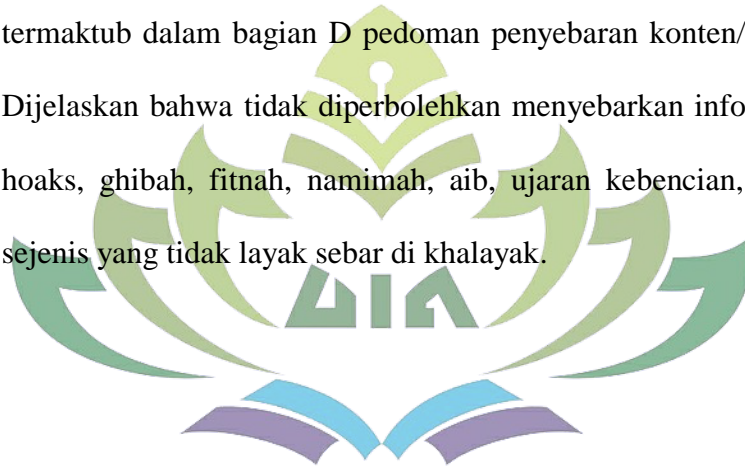
Seorang ulama yang bernama Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa ayat yang telah dijelaskan tersebut, merupakan ayat yang menjadi landasan untuk membolehkan seseorang yang meminta jabatan jika dirinya mampu dan memiliki pengetahuan yang layak. Berdasarkan tafsir ayat tersebut Nabi Yusuf a.s. meminta jabatan karena ia yakin saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, serta hak-hak orang lain.

---

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema, 2012), h. 242.

Apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya sudah sanggup atau layak terhadap jabatan tersebut, dan saat itu tidak ada yang mampu mencalonkan, maka menjadi wajib baginya meminta dengan mengabarkan bahwa dirinya layak menjadi seorang pemimpin.

Sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) , larangan ujaran kebencian juga dipertegas dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hal ini termaktub dalam bagian D pedoman penyebaran konten/informasi poin 3. Dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyebarkan informasi yang berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar di khalayak.



### BAB III

## KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN

### DALAM PILPRES 2019

#### A. Dasar Hukum Larangan Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019

##### 1. Dasar Hukum Larangan Kampanye Hitam

Selain sebagai Negara demokrasi, Indonesia juga merupakan Negara hukum yang menempatkan hukum pada kedudukan yang paling tinggi, atau lebih sering dikenal dengan istilah *supremacy of law*.<sup>36</sup> Maka dari itu, segala sesuatunya harus jelas sumber hukumnya, baik secara formil maupun secara materil.

Sumber hukum materil secara sederhana dapat diartikan sebagai bahan yang dapat menjadi formal, dan untuk bahannya ia dapat memasukkan nilai-nilai substantif ke dalam berbagai hukum di Indonesia tanpa secara eksklusif dan formal menyebut hukum Islam.<sup>37</sup>

Peraturan mengenai kampanye secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang

---

<sup>36</sup>M.Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi", Jurnal *Al-'Adalah*, Vol.XII No.2 (2014), h. 255 (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186> (diakses pada 27 Agustus 2019, pukul 11:54 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

<sup>37</sup>Siti Mahmudah, "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia", Jurnal *Al-'Adalah*, Vol.X No.4 (2012), h. 411 (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/294> (diakses pada 27 Agustus 2019, pukul 11:51 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

ini, mengatur beberapa hal yang meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil pemilu, tindak pidana pemilu, dan ketentuan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pemilu ialah pemilihan atas para wakil rakyat baik yang akan menduduki jabatan di lembaga legislative seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota, serta wakil rakyat yang menduduki jabatan eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>38</sup>

Secara gamblang, larangan tentang kampanye hitam terdapat dalam pasal 280 ayat (1) terkait dengan menghina, menghasut, mengadu domba, dan juga mengganggu ketertiban umum. Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, larangan kampanye hitam juga diatur pada KUHP Pasal 14, Pasal 15, Pasal 310, dan Pasal 311.

## 2. Dasar Larangan Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang sering dikaitkan oleh kaum yang sedikit atau bisa juga berkaitan dengan masyarakat asli atau suatu komunitas tertentu dan juga bisa menyebabkan suatu permasalahan yang menderita, tetapi si pelaku tidak peduli. Ujaran kebencian cukup berbeda dengan ujaran yang lainnya, walaupun dapat

---

<sup>38</sup>Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif", Jurnal *Al- 'Adalah*, Vol.XII No.3 (2015), h. 527 (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/205> (diakses pada 26 September 2019, pukul 11:55 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



dikatakan ujaran kebencian memiliki unsur yang bersifat membenci, merusak dan menghina. Perbedaan dengan unsure yang lain ialah terletak dari niat suatu ujaran yang dapat mempengaruhi pihak tertentu, dengan secara langsung atau tidak langsung. Apabila ujaran yang dikeluarkan itu, dikatakan dengan jiwa yang penuh dengan semangat serta dapat mendorong para pendengarnya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau kelompok lain, maka dapat dikatakan ujaran itu pula suatu hasutan kebencian yang berhasil dilakukan.<sup>39</sup>

Seluruh Negara di dunia mempunyai aturan atau pedoman yang melarang adanya ujaran kebencian atau dasar hukum larangan ujaran kebencian. Di Indonesia, juga mengatur tentang larangan ujaran kebencian diantaranya dalam beberapa pasal KUHP seperti Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311.

Pasal 156 KUHP menyebutkan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan :

---

<sup>39</sup>M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia”, Jurnal *Keamanan Nasional*, Vol.1 No. 3 tahun 2015) h. 345-346 (On-Line). Tersedia di <http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/viewfile/30/23> (diakses pada 20 September 2019, pukul 10:43 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Apabila yang melakukan kejahatan itu pada saat menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP menyebutkan:

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1) berbunyi, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

## **B. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019**

### **1. Bentuk-Bentuk Kampanye Hitam**

Secara khusus kampanye hitam ini tidak mempunyai bentuk-bentuk yang terperinci, akan tetapi mempunyai perbuatan-perbuatan yang

mengandung unsur dalam kampanye hitam itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada saat masa kampanye terjadi yang disertai adanya banyak perbuatan curang yang ikut serta dalam jalannya suatu kampanye.

Pilpres 2019 lalu, pelaksanaan kampanye hitam terjadi dengan adanya berita-berita yang belum terbukti kebenarannya yang muncul dalam berbagai media, baik media massa maupun media sosial. Adapun beberapa perbuatan yang mengandung suatu unsur dalam kampanye hitam adalah sebagai berikut :

a. Fitnah

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa fitnah berasal dari bahasa arab yang artinya ialah cobaan dan ujian.<sup>40</sup> Fitnah merupakan salah satu bentuk larangan dari peranan hukum Islam dalam tata hukum. Peranan hukum islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya BPUPKI (badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia).<sup>41</sup>

Kampanye dalam Pilpres 2019 lalu telah banyak terjadi fitnah serta isu-isu yang menyerang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berusaha menjatuhkan. Contohnya saja pada masa

<sup>40</sup> *Al Jamli Li Ahkam Al-Qur'an* (19/295)

<sup>41</sup> Khoruddin Buzama, "Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah* Vol.X No.4 (2012), h. 470 (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/300> (diakses pada 27 September 2019, pukul 12:10 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

kampanye berlangsung, baik kubu Prabowo dan kubu Jokowi diserang dengan fitnah salah satunya fitnah yang mengatakan tentang keturunan dari Prabowo dan Jokowi.

Fitnah yang menyerang Prabowo salah satunya, beliau diisukan memiliki dua kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Yordania tak hanya itu, beliau juga diisukan beragama Kristen.

Sedangkan fitnah yang menyerang Jokowi beliau diserang dengan isu keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, selain itu juga beliau diisukan sebagai keturunan PKI bahkan isu itu, hingga kini terus menyelimuti Joko Widodo.

Fitnah memiliki beberapa unsur-unsur yang terdiri atas :

1) Unsur objektif, terdiri dari :

- a) Perbuatan: melakukan pengaduan, dan mengajukan pemberitahuan
- b) Tertulis dan dituliskan
- c) Objek mengenai seseorang
- d) Isinya palsu
- e) Tertuju pada penguasa
- f) Kehormatan atau nama baiknya terserang

2) Unsur subjektif, dengan disengaja

- a) Terdapat dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah di antaranya, mengadukan pengaduan atau mengadukan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan.
- b) Unsur tertulis dan dituliskan, ialah dua cara yang dilakukan untuk mengajukan pengaduan atau pemberitahuan. Secara tertulis maksudnya si pembuat mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan berupa surat yang ditanda tangani kemudian kemudian disampaikan kepada pejabat atau penguasa. Mengajukan secara tertulis ini bukan hanya berarti menyampaikan langsung oleh si pembuat kepada pejabat, tetapi dapat juga disampaikan lewat perantara. Sedangkan secara dituliskan ialah, si pembuat datang menghadap kepada pejabat yang berkuasa, kemudian menyampaikan pengaduan atau pemberituannya yang disertai permintaan pada pejabat tersebut supaya isi pengaduan atau pemberituannya dituliskan. Namun, inisiatif untuk dituliskannya pengaduan atau pemberitahuan harus dari si pembuat bukan dari pejabatnya.

b. Pencemaran nama baik

Secara umum pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu



baik melalui lisan maupun secara tulisan.<sup>42</sup> Pencemaran nama baik terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya; secara lisan, dan secara tertulis. Secara lisan, ialah pencemaran nama baik yang diucapkan, sedangkan secara tertulis, ialah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.<sup>43</sup>

Pada pilpres 2019, kasus pencemaran nama baik ikut mencemari demokrasi di Indonesia. kasus ini juga menyerang kedua paslon presiden dan wakil presiden.

Pada kubu Prabowo-Sandi diserang dengan pencemaran nama baik berupa strategi kampanye yang dikatakan mengikuti gaya Donald Trump, sedangkan kubu Jokowi-Ma'aruf diserang dengan pencemaran nama baik yang diisukan sangat mendukung kaum nasrani dibandingkan dengan kaum muslim di Indonesia. Walaupun demikian, berita tersebut tidak dapat menghalangi berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia.

Pencemaran nama baik yang hendak dilindungi ialah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di mata orang lain walaupun orang tersebut telah mengerjakan perbuatan kejahatan yang berat, sehingga terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Menyerang kehormatan berarti juga melakukan perbuatan

---

<sup>42</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1991), h. 225.

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 224.

menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, rasa hormat dan juga perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>44</sup>

Terdapat tiga catatan penting di dalam tindak pidana pencemaran nama baik, diantaranya:

1. Delik pencemaran nama baik ialah delik yang sifatnya subjektif artinya penilaian terhadap pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karena itu, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh pihak yang berwenang jika pengaduan dari korban pencemarannya.
2. Pencemaran nama baik ialah delik penyebaran yang artinya substansi yang berisi pencemaran disebarkan kepada umum oleh pelaku.
3. Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Tindak pidana pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>44</sup>Muzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, (Jakarta: Dictum, 2004), h. 17.

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa unsur diantaranya :

- a. Menyerang nama baik seseorang atau kehormatannya
- b. Dengan cara menuduhkan sesuatu
- c. Terjadi di depan umum atau lebih dari satu orang selain korban
- d. Pencemaran nama baik lebih berat dilakukan oleh pelaku melalui media tulisan atau gambaran yang ditempel di muka umum

- e. Jika dikarenakan oleh kepentingan umum atau terpaksa membela diri tidak termasuk tindak pidana.<sup>45</sup>

Selain pasal 310 KUHP, terdapat juga dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Tanpa hak atau tanpa izin
- c. Bertujuan menyerang nama baik atau kehormatan
- d. Agar diketahui umum.<sup>46</sup>

#### c. Penghinaan

Penghinaan termasuk ke dalam suatu tindakan atau sikap yang melanggar atau mencemarkan nama baik atau kehormatan pihak lain yang secara luasnya penghinaan ialah perbuatan atau sikap yang

---

<sup>45</sup>Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Visi Media, 2011), h. 103-104.

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 105.

bertentangan dengan tata karma dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari.

Kasus penghinaan yang terjadi dalam Pilpres 2019 salah satunya ialah yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Jawa Barat yang menghina kubu Jokowi akan melanggar syariat Islam jika nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Ibu-Ibu tersebut mengatakan, apabila nantinya Jokowi terpilih tidak akan ada lagi suara adzan, selain itu mereka mengatakan bahwa sesama jenis diperbolehkan menikah.

Tentunya berita tersebut tidak benar adanya, karena mereka tidak bisa membuktikan secara hukum bahwa kubu Jokowi akan melanggar syariat Islam. Kasus penghinaan tersebut membuat ibu-ibu dari Jawa Barat itu diperiksa oleh pihak yang berwajib.

Penyerangan kehormatan orang lain akan menyebabkan akibat berupa rasa malu atau tercemarnya harga diri atau kehormatan orang lain. Pastinya akibat tersebut memiliki dua sisi nilai yaitu subyektif dan obyektif.

Sisi subyektif ialah adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terluka atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan orang lain. Sedangkan sisi obyektif ialah suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan yang harus bisa dinilai secara akal sehat (*commom sense*)

bahwa hal tersebut benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan sempit atau subyektif seseorang.<sup>47</sup>

Pasal 315 KUHP mengatur tindak pidana penghinaan yang berbunyi, “tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam tindak pidana penghinaan terdapat beberapa unsur-unsur di antaranya :

1) Unsur objektif, di antaranya :

- a. Perbuatan menyerang
- b. Dengan objek; kehormatan seseorang, nama baik seseorang
- c. Dengan cara; lisan di muka umum, tulisan di muka umum, lisan di muka orang itu sendiri, perbuatan di muka orang itu sendiri, dan dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya
- d. Tidak memiliki sifat pencemaran atau pencemaran tertulis

2) Unsur subjektif

---

<sup>47</sup>J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 45.



Pada pasal yang disebutkan di atas, terdapat kedekatan makna dengan isi pasal 310 KUHP, namun memiliki beberapa perbedaan di antaranya:

1. Pada pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama ialah pelaku menyerang kehormatan/ nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarkan dan/atau dilakukan dihadapan orang lain yang bukan korban sehingga diketahui secara umum.
2. Sedangkan pada pasal 315 KUHP yang menjadi unsur utama ialah adanya penghinaan tetapi bukan untuk mencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau hanya dihadapan korban.<sup>48</sup>

Penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib bila terdapat pengaduan dari orang yang menderita /dinista/dihina. Kecuali, penghinaan atau pencemaran itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.<sup>49</sup>

## 2. Bentuk- Bentuk Kampanye Hitam

Tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam KUHP dan juga ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP, yang berbentuk diantaranya:

### 1) Penghinaan

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 46.

<sup>49</sup>P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 473.

Tindak pidana penghinaan bisa juga disebut dengan ujaran kebencian yang jika suatu penghinaan itu tertuju oleh satu orang atau beberapa kelompok yang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan tersebut dapat berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.<sup>50</sup>

## 2) Pencemaran Nama Baik

Telah disebutkan sebelumnya, pencemaran nama baik disebutkan dalam KUHP dan memiliki pengertian tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan pihak lain dengan jalan mengungkapkan sesuatu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pencemaran nama baik juga bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian dan tidak jauh berbeda dengan penghinaan yang apabila serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, dan serangan tersebut menuju kepada kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel) orientasi seksual, ekspresi gender serta

---

<sup>50</sup>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. (Jakarta: Komnas Ham, 2015), h. 14.

serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan.<sup>51</sup>

### 3) Penistaan

Berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan ialah suatu perbuatan yang dikerjakan dengan jalan menuduh ihak lain atau suatu perbuatan yang bertujuan supaya tuduhan tersebut tersebar luas dan diketahui publik.

Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa perbuatan atau tuduhan tersebut tidak harus suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman misalnya seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan lain sebagainya. Tetapi juga dapat dilakukan dengan perbuatan biasa yang sudah pasti membuat seseorang merasa malu.

Kemudian, pada penistaan dengan surat, menurut pasal ini juga dijelaskan bahwa apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka kejahatan tersebut dinamakan menista dengan surat.

### 4) Perbuatan tidak menyenangkan

Berbeda dengan bentuk sebelumnya, seseorang dapat dikenai tindak pidana ini dengan hanya menyinggung perasaan seseorang. Maka dari itu, perlu diketahui apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan tidak menyenangkan.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 15.

Perbuatan ini diatur berdasarkan pasal 310 KUHP yang berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan menggunakan kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

#### 5) Memprovokasi

Berdasarkan pasal 156 KUHP memprovokasi ialah suatu tindakan dengan cara menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, dan penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan. Menurut pasal ini, memprovokasi bisa disebut sebagai ujaran kebencian apabila perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Pada pasal tersebut menyebutkan golongan, dan golongan tersebut yang dimaksud yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya dikarenakan ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara.<sup>52</sup>

#### 6) Menghasut

---

<sup>52</sup>Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana menghasut atau hasutan diatur dalam pasal 160 KUHP yang kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi rumusan delik materil yang memiliki makna pelaku penghasutan baru bisa dipidana apabila berdampak pada tindak pidana yang lain, misalnya seperti kerusuhan, atau suatu perbuatan anarki.

#### 7) Menyebarkan berita bohong

Pada pasal 28 ayat (1) UU ITE terdapat salah satu unsur, unsure tersebut ialah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Perlu diketahui bahwa frasa bohong dan menyesatkan merupakan dua hal yang berbeda. Pada frasa menyebarkan berita bohong yang diatur ialah masalah perbuatan, dan untuk frasa menyesatkan yang diatur ialah masalah akibat dari perbuatan yang salah.

### **C. Mekanisme Penyebaran Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019**

Pada Pilpres 2019 lalu, sering sekali kita mendengar berita tentang kampanye para calon pemimpin. Namun, sangat disayangkan ada beberapa berita yang sering kita dengar tentang kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum baik itu pendukung, maupun tim kampanye masing-masing paslon.

Pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang sering disebut dengan pilpres merupakan suatu kondisi yang memungkinkan proses pembelajaran politik terhadap masyarakat dapat terwujud sehingga daya kritis

masyarakat dalam berpolitik meningkat. Pada dasarnya, pilpres langsung ialah sebuah mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di Negara, yang mana rakyat diberikan hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan calon kepala pemerintah yang dianggap mampu menyuarakan aspirasinya.<sup>53</sup>

Selanjutnya dalam menyebarkan kampanye hitam dan ujaran kebencian, para oknum memiliki mekanisme atau cara-cara yang dipakai dalam penyebarannya, diantaranya<sup>54</sup> :

Pertama, *facebook*. *Facebook* seringkali memberikan fasilitas seperti grup atau *fanpage* untuk berkomunikasi dengan anggotanya. Sehingga ruang publik seperti grup maupun *fanpage* merupakan media yang efektif dalam berkomunikasi antara anggota. Seperti halnya MCA (*Muslim Cyber Army*) yang seringkali melontarkan *hate speech* dan *hoax* melalui grup dan *fanpage facebook*. Sistem kerja grup dan *fanpage facebook* adalah setiap anggota dari grup maupun *fanpage* memiliki kebebasan dalam melakukan *posting*. Sehingga *facebook* lebih ramai akan informasi *hoax* dan *hate speech* karena setiap anggota dapat mengutarakan pendapat mereka secara bebas. Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup sebanyak 551 akun *facebook* yang terindikasi *hoax*.

---

<sup>53</sup> Hafied Canagara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, h. 200.

<sup>54</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: RemadjaKarya, 2005), h. 44.



Kedua, *instagram*. *Instagram* yang hanya memiliki fitur *upload* foto atau video juga sangat efektif dalam menyebarkan kampanye hitam dan ujaran kebencian. Namun *instagram* tidak dapat membuka ruang komunikasi publik layaknya *facebook*. *Instagram* hanya bisa memengaruhi pembaca melalui *postingan* yang diunggah. Sehingga *instagram* lebih memaksimalkan terhadap intensitas pemberitaan serta isu yang dibawa. Selain itu fitur tanda tagar (#) dimaksimalkan untuk menyebarkan pemberitaan. Semakin banyak tagar yang dipakai, maka semakin luas pula penyebaran pemberitaannya. Tanda tagar #2019gantipresiden dalam *instagram* mencapai 1,7 juta foto dan video. Sehingga *instagram* merupakan media yang efektif dalam menyebarkan pemberitaan. Sehingga Kementerian Komunikasi dan Informasi juga menutup sebanyak 848 akun *instagram* dan *twitter*.

Ketiga, *whatsapp*. *Whatsapp* merupakan media yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. *Whatsapp* bukan hanya memberikan fitur untuk berkomunikasi antarindividu melainkan komunikasi kelompok (grup). Salah satu fasilitas untuk menyebarkan pemberitaan secara luas dan cepat adalah melalui grup. Seperti yang terjadi pada kasus *hoax* dalam Pilpres 2019. Banyak pemberitaan *hoax* tersebar dalam grup *whatsapp*. Salah satu pola pemberitaan dalam *whatsapp* yakni salah satu akun melakukan *copy-paste* berita *hoax* dalam grup. Hal ini bertujuan untuk semua anggota grup membaca berita yang disebar. *Whatsapp* merupakan salah satu media sosial terbesar melakukan penyebaran *hoax*. Karena setiap akun dapat melakukan *copy-paste*

berita tanpa ada *filter* terlebih dahulu, sehingga berbeda dengan *Instagram*, *facebook*, dan *twitter*, media sosial *whatsapp* berperan sebagai penyaluran pemberitaan *kampanye* hitam dan ujaran kebencian.

Ketiga mekanisme tersebut dapat pelaku sebarluaskan melalui media massa yang menguatkan dalam membentuk keyakinan-keyakinan baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Proses sosialisasi media massa ruang lingkungannya cukup luas dari media sosial lainnya, seperti iklan-iklan yang ditayangkan media massa yang disinyalir telah menyebabkan terjadinya perubahan pola konsumsi bahkan gaya hidup warga masyarakat.<sup>55</sup>

Media sosial yang sering digunakan dalam melancarkan kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 adalah *facebook*, *instagram*, dan *whatsapp*. Pada dasarnya setiap media sosial memiliki peranan masing-masing dalam menyebarkan pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres.<sup>56</sup>

Pada tahun 2019 sekitar 61.000 akun *whatsapp* telah ditutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi karena telah teridentifikasi penyebar *hoax*. Penyebaran *hoax* paling besar yakni melalui media sosial. Penyebaran *hoax* terbesar kedua yakni melalui *chat*. Sehingga dari data di atas dapat terlihat bahwa intensitas penyebaran *hoax* melalui media sosial dan *chat*

---

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 45.

<sup>56</sup>J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 50.

sangat besar. Selain itu, penyebaran *hoax* melalui media sosial dan *chat* sangat efektif untuk memengaruhi pembaca.<sup>57</sup>

Terdapat empat manfaat media sosial dalam praktik demokrasi, pertama sebagai akses informasi. Media sosial (medsos) menjadi sumber akses informasi yang menampung aspirasi masyarakat dan notabene masyarakat mampu mengedepankan kepentingan umum. Kedua, interaksi. Tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia menyebabkan terjadinya interaksi walaupun hanya sebatas di dunia maya.

Namun, dari interaksi inilah yang menjadi ajang memperkuat demokrasi. Ketiga, partisipasi. Bagi demokrasi media sosial menjadi wadah baru untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi disemua aspek kehidupan. Keempat, desentralisasi informasi. Media sosial bermanfaat dalam membawa pemerintah lebih dekat dengan warga negaranya sehingga memudahkan masyarakat terlibat dalam praktik demokrasi.

Media sosial memiliki beberapa keunggulan untuk memperkuat demokrasi. Akan tetapi di lain sisi media sosial juga menunjukkan terbangunnya interaksi negatif untuk memengaruhi masyarakat.<sup>58</sup>

Pertama yakni akses informasi. Saat ini media sosial banyak diminati oleh masyarakat untuk sumber informasi. Bukan hanya sumber informasi keilmuan, namun juga terkait dengan pemberitaan yang *ter-up to date*.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, h. 51.

<sup>58</sup>Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Visi Media, 2011), h. 110..

Kedua, interaksi, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa memang interaksi sangat tinggi dalam penggunaan media sosial. Terutama jika menggunakan media sosial *facebook*. *Facebook* dapat membuka ruang publik yang mampu mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam ranah politik.

Ketiga, partisipasi. Media sosial bukan hanya dipandang sebagai fasilitas mendekatkan informasi kepada masyarakat. Namun, media sosial juga memotivasi masyarakat dalam berpartisipasi di ranah politik.

Keempat, desentralisasi informasi. Hal sudah sangat sering digunakan oleh pemerintah bahwa media sosial merupakan sumber transparansi pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat memantau kinerja dari pemerintahan.

Keempat faktor di atas merupakan keunggulan dari media sosial, namun ternyata di sisi lain media sosial juga memiliki sisi negatif. Salah satu fenomena yang terbentuk dari media sosial adalah *hate speech* dan *hoax*. Sejauh ini menurut informasi dari kominfo.com terdapat 800.000 situs yang terindikasi melakukan penyebaran informasi palsu. Angka tersebut sangat fantastis jika dibanding dengan 132,7 juta orang pengguna media sosial di Indonesia.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 111.

Adapun beberapa teknik yang pelaku lakukan untuk menyebarkan ujaran kebencian diantaranya :<sup>60</sup>

1. Membuat group atau kelompok dalam sosial media, kemudian pelaku menuliskan banyak ujaran kebencian seperti SARA yang menyerang pemimpin, lalu pelaku kaitkan dengan kebangkitan PKI yang menyudutkan pemimpin Negara.
2. Membuat meme dengan berisikan kata-kata provokatif yang menjatuhkan pemimpin atau pihak lain, kemudian meme tersebut pelaku sebar di sosial media dengan mengatas namakan kebaikan.
3. Menyebarkan virus-virus pada sistem, dengan cara mengambil data pribadi seseorang yang dimuat di media sosial. Hal ini bertujuan untuk merusak sistem supaya masyarakat mempercayai ujaran yang pelaku sebar.
4. Membuat anggota yang bertugas menjadi pihak seolah-olah dirugikan oleh kebijakan pemimpin Negara atau pihak tertentu supaya masyarakat semakin mempercayai ujaran yang pelaku sebar.
5. Membuat konten SARA semenarik mungkin supaya menjadi bahan perbincangan masyarakat yang belum mengetahuinya.

Pelaksanaan kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam hal ini juga merupakan kejahatan terhadap kepentingan hukum Negara yang dilakukan

---

<sup>60</sup>Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 480.

dengan saling serang oleh masing-masing paslon dari berbagai kesempatan di berbagai media.

Pelaksanaan Pilpres telah membawa banyak harapan baru masyarakat untuk pengembangan demokrasi di Negara, di antaranya:<sup>61</sup>

- 1) Secara empirik, pilpres memiliki nilai yang strategis dalam rangka mengurangi kelemahan yang menjadikan perpolitikan saat ini.
- 2) Pilpres juga dapat dijadikan sebagai ruang pengelolaan kedaulatan rakyat disamping sebagai instrument untuk mendorong mekanisme demokrasi bekerja di tingkat lokal.
- 3) Pilpres dapat dijadikan alat untuk memperkuat institusi politik lokal.

Bagi masyarakat, penerapan pilpres dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lebih luas tentang perpolitikan. Dengan adanya pilpres, persaingan antara masing-masing calon untuk mempengaruhi opini publik semakin ramai dan intens aktivitas marketing membuat kandungan informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin besar dan memunculkan prodak politik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Produk politik tersebut bisa berupa atribut kandidat seperti latar belakang kandidat, program kerja, ideologi, partai politik dan dengan memunculkan *strategi political marketing*. Strategi tersebut, membuat

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 481.



masing-masing paslon memasarkan ide dan gagasan politik secara maksimal kepada masyarakat untuk mendapat dukungan.<sup>62</sup>

Kampanye hitam dan ujaran kebencian yang dimaksud ini bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat dari berbagai komunitas yang dapat dibedakan dalam berbagai aspek berdasarkan mekanisme penyebarannya, yang diantaranya:<sup>63</sup>

- a. Suku, dalam aspek ini mengusahakan dukungan umum dengan menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadi konflik antar suku.
- b. Agama, yang dilakukan ialah menghina atas dasar agama berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
- c. Aliran keagamaan, aspek ini menganjurkan untuk megusahakan dukungan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang ada di Indonesia atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.
- d. Keyakinan atau kepercayaan, dilakukan dengan cara menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan keyakinan atau kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

---

<sup>62</sup>Agus Naryosao, "Majalah Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik", Jurnal *Universitas Diponegoro* Vol. 36 No. 2 Tahun 2008, h. 43.

<sup>63</sup>Annisa Ulfa Haryati, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang *Hate Speech*" (Skripsi Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 11.

- e. Ras, dengan menunjukan kebencian atau rasa benci terhadap orang lain dikarenakan memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- f. Anggota golongan, dilakukan dengan penyebarluasan kebencian terhadap antar golongan penduduk dengan maksud untuk menghasut orang lain supaya melakukan kekerasan, diskriminasi, atau penghasutan.
- g. Warna kulit, dilakukan dengan menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain dikarenakan perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
- h. Etnis, tidak jauh berbeda dengan ras aspek ini juga para penyebar lakukan dengan menunjukan kebencian atau rasa benci terhadap orang lain karena memperlakukan pembedaan, pemilihan, atau pembatasan atas etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atas pelaksanaan hak asasi manusia.
- i. Gender, dengan menampilkan berbagai bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang memiliki pengaruh atau tujuan supaya mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia yang berdasarkan atas jenis kelamin.
- j. Kaum difabel, biasanya para penyebar melakukannya dengan menunjukan kebencian terhadap kaum difabel, dengan adanya

pembedaan, pembatasan, hambatan, pengurangan atau penghilangan hak pada penyandang kaum difabel.

- k. Ekspresi gender, menyulutkan atau menebarkan kebencian pada orang lain yang mempunyai orientasi seksual atau ekspresi gender dan menimbulkan diskriminasi kepada kaum itu.

Selain aspek yang diperlihatkan, para penyebar ujaran kebencian juga memiliki sarana yang digunakan supaya mempermudah aksi mereka, yang di antaranya sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Kampanye

Yaitu, berupa orasi maupun tulisan yang menyatakan pikiran mereka di depan umum, baik secara tulisan maupun lisan dengan menghasut orang lain supaya melakukan kekerasan, diskriminasi dan permusuhan

- b. Spanduk atau banner

Yaitu mempertunjukkan atau menempelkan sebuah tulisan disertai dengan gambar dan memuat informasi di depan umum yang mengandung pernyataan kebencian dan penghinaan yang dimaksudkan agar menghasut orang dengan melakukan kekerasan, diskriminasi, dan pembedaan.

- c. Jejaring media sosial

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 15.

Yaitu ujaran kebencian yang dilakukan dengan menggunakan media massa baik cetak ataupun elektronik, di antaranya:

- 1) Mentransmisikan atau mendistribusikan dengan membuat diaksesnya sebuah informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan pencemaran nama baik.
- 2) Menebarkan atau menyebarkan berita bohong supaya menimbulkan sebuah kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan.

d. Penyampaian pendapat di depan umum

Yaitu menyatakan pikirannya di khalayak ramai atau di depan umum dengan cara menghasut orang untuk melakukan kekerasan atau permusuhan.

e. Ceramah keagamaan

Yaitu ceramah yang dilakukan dengan cara menghasut supaya memusuhi, mendiskriminasi dan melakukan kekerasan berdasarkan agama dan menyalahgunakan isi kitab suci demi kepentingan tertentu.

f. Media massa atau elektronik

Yaitu menyebarkan dan membuat akses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.

g. Pamphlet

Yaitu menyiarkan, mempertunjukan dan menempelkan tulisan yang disertai gambar di depan umum yang mengandung sebuah kebencian atau rasa benci dengan tujuan menghasut orang lain supaya melakukan perbuatan melanggar hukum.

Demokrasi di Indonesia bukan hanya sekedar demokrasi formal, melainkan juga demokrasi secara materil, demokrasi yang menjunjung tinggi serta menjamin hak-hak politik, baik hak asasi dan hak kebebasan dasar manusia, termasuk kebebasan pers.<sup>65</sup> Akan tetapi yang dimaksud kebebasan disini bukanlah bertujuan untuk melakukan hal yang mencurangi demikrasi. Indonesia memiliki istilah LUBER JURDIL dalam pelaksanaan demokrasi.

Salah satu nilai yang dapat diambil dari istilah itu ialah nilai jujur dan adil karena nilai tersebut merupakan nilai yang menegaskan dilarangnya kampanye hitam dan ujaran kebencian, khususnya dalam Pilpres 2019. Karena tujuan dari pesta demokrasi atau pemilu ialah untuk memilih calon yang akan mengisi suatu jabatan, bukan untuk menjatuhkan orang lain.

---

<sup>65</sup> Aulia, *Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa*, dalam *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 Tahun 2014, h. 120-121.

## **D. Penanggulangan Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019**

### **1. Dampak Positif Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di Masyarakat**

Telah kita ketahui bahwa pesta demokrasi atau yang lebih akrab disebut dengan pemilu merupakan elemen penting dikarenakan membuka kesempatan bagi warga Negara ataupun masyarakat bebas berpartisipasi secara aktif dalam memilih calon pemimpin sehingga pemilu ialah inti dari demokrasi.<sup>66</sup> Pada pemilihan umum khususnya dalam Pilpres 2019 lalu, tentunya terdapat kampanye yang digunakan untuk memperkenalkan calon atau kandidat yang akan dipilih oleh masyarakat sesuai nuraninya. Kampanye yang sehat digunakan untuk mempromosikan visi maupun misi dan tujuan oleh setiap calon pemimpin.

Tentunya kampanye yang sehat dan jujur akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dan peserta kampanye, begitupun dengan kampanye hitam dan ujaran kebencian berdampak positif walaupun lebih banyak negatifnya bagi masyarakat, tetapi walaupun sedikit dampak tersebut bagi masyarakat terasa jelas, dan di antaranya :<sup>67</sup>

- 1) Menambah keingintahuan masyarakat atau pemilih akan kebenaran berita kampanye hitam dan ujaran kebencian atas calon presiden yang didukungnya.

---

<sup>66</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 225.

<sup>67</sup>Aulia, *Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa*, dalam *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2 Tahun 2014, h. 135.

- 2) Meningkatkan antusias masyarakat dan pemilih untuk selalu membaca berita atau mengecek kebenaran yang ada.
- 3) Membuat masyarakat menjadi cerdas dalam menanggapi berita-berita tidak dengan bersikap bijak pada berita-berita kampanye hitam dan ujaran kebencian terhadap paslon atau kandidat presiden.

Kampanye yang dilakukan peserta pada umumnya bermanfaat pada masyarakat untuk mengetahui bagaimana calon presiden yang nanti dipilih, apakah sesuai serta mampu menjadi pemimpin suatu Negara, dalam menjalankan visi dan misinya untuk memajukan Negara, dan mensejahterakan masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya, supaya masyarakat dapat dengan yakin memilihnya menjadi seorang pemimpin Negara.

## 2. Dampak Negatif Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di Masyarakat

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kampanye hitam dan ujaran memiliki lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan positifnya. Kampanye hitam dan ujaran kebencian bukanlah pilihan yang tepat untuk berpolitik, karena memiliki unsur jahat dan melanggar norma baik masyarakat ataupun agama. Selain itu, kampanye hitam dan ujaran kebencian juga memberikan pendidikan politik yang sangat buruk bagi masyarakat.

Kampanye hitam dan ujaran kebencian merupakan upaya yang dihalalkan oleh para penyebar keburukan untuk memberikan keuntungan



tertentu. Upaya yang menghalalkan segala cara inilah yang melandasi dipilihnya bentuk kampanye yang menunjukkan betapa buruknya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan hal tersebut.

Berikut, beberapa dampak negatif dari kampanye hitam dan ujaran kebencian yang terjadi di masyarakat diantaranya sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Membuat perdebatan antara masyarakat yang memiliki pendapat yang berbeda terhadap calon yang dipilihnya.
- 2) Merusak moral dan pikiran masyarakat bahkan anak-anak atas berita-berita kampanye hitam dan ujaran kebencian yang mengandung kata-kata keburukan atau kejelekan.
- 3) Pendiskriditan moral sehingga menggiring opini publik bahwa politik itu kejam dan menyesatkan.
- 4) Pembodohan masal yang membuat masyarakat menjadi keliru terhadap pemberitaan yang benar diakibatkan pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian yang ditemipilkan di media massa atau media sosial.

Sikap khusus dari adanya pemilihan umum dan juga pengawas pemilihan umum, bukan hanya sekedar regulasi yang dibutuhkan tetapi juga tingkat kerja yang khusus untuk menjaga agar kampanye yang dilakukan tetap berada pada posisi prinsipil penyelenggaraan kampanye. Disinilah peran penyelenggara dan juga pengawas pemilihan umum

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 137.

supaya dituntut untuk sigap dan cermat dalam menghadapi masalah pada pemilihan umum khususnya kampanye hitam.

Kampanye hitam dan ujaran kebencian sudah pasti menyebabkan kerusakan dan perpecahan jika tidak cepat ditangani. Maka dari itu, seharusnya pesta demokrasi atau pemilihan umum khususnya Pilpres dilakukan dengan mengarah pada kebaikan, dengan memperlihatkan prestasi-prestasi calon pemimpin serta visi dan misi yang bisa dimengerti masyarakat.

Kampanye hitam dan ujaran kebencian termasuk ke dalam kejahatan karena menimbulkan masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh masyarakat. Kejahatan yang diperlihatkan dapat berupa pelanggaran yang dari norma-norma yang dikenal masyarakat seperti norma agama, dan norma moral hukum. Supaya tidak ada lagi kejahatan yang lainnya, maka diperlukan adanya pencegahan kejahatan.

Pencegahan kejahatan merupakan suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan ataupun dengan usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar terhadap masyarakat umum.

Maka dari itu, kunci dan strategi dalam menanggulangi kejahatan meliputi ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk.

Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.<sup>69</sup>

Upaya penanggulangan tersebut diantaranya dibagi menjadi dua kebijakan yaitu:

- a. Kebijakan pidana dengan sarana non penal, yaitu meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
- b. Kebijakan pidana dengan sarana penal, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
  - 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
  - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenalkan pada pelanggar.<sup>70</sup>

---

4. <sup>69</sup>Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya, 1994), h.

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 5.

## **BAB IV**

### **KAMPANYE HITAM DAN UJARAN KEBENCIAN DALAM PILPRES 2019 MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **A. Pola Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019**

Fenomena kampanye hitam dan ujaran kebencian semakin marak dalam Pilpres 2019. Setiap proses menuju Pilpres 2019 selalu diselingi oleh kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial.

Pola penyebaran kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 pada dasarnya dapat diidentifikasi. Karena akun penyebar kampanye hitam dan ujaran kebencian selalu memiliki pola penyebarluasan berita yang sama. Adapun pola tersebut di antaranya:

*Pertama*, pengenalan massa. Akun pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian sangat mengenali pengguna media sosial aktif yaitu mayoritas anak muda atau sekitar 15-60 tahun. Pada pola ini, akun pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan memantau data yang sudah mereka buat sehingga para pelaku dengan mudah menemukan akun media sosial aktif pemilih.

*Kedua*, penyebar pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian selalu memberikan pemberitaan yang berulang. Sehingga satu topik bisa menjadi beberapa bagian pemberitaan dengan tujuan mengingatkan kembali

kepada masyarakat akan kelemahan seseorang. Setelah mengetahui kelemahan seseorang, maka para pelaku dapat dengan mudah menyebarkan kejelekannya pada setiap media.

*Ketiga*, legitimasi. Legitimasi bisa menjadi salah satu bukti agar pemberitaan yang belum tentu kebenarannya dipercaya oleh masyarakat. Legitimasi dapat berupa bukti foto atau video. Foto atau video tersebut cenderung berisi SARA kemudian pelaku sebarkan pada laman media sosial.

Jika melihat pola di atas, maka pola kampanye hitam dan ujaran kebencian seringkali mempraktikkan ketiga tahapan di atas. Misalkan Jokowi adalah PKI. Pertama, akun penyebar kampanye hitam dan ujaran kebencian mengetahui sejarah Indonesia dan PKI. Sejarah buruk antara Indonesia dan PKI dimanfaatkan untuk memengaruhi massa Jokowi agar tidak memilih Jokowi. Kedua, intensitas pemberitaan. Pemberitaan bahwa Jokowi dalah PKI tersebar hampir di seluruh media sosial dan pemberitaan *online*.

Kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 sedikit banyak mempraktikkan teori komunikasi politik dalam penyebarluasannya. Penyebaran menggunakan jaringan akun-akun yang telah terintegrasi sehingga memiliki pola pemberitaan yang sama. Selain itu, dilakukan pemberitaan yang intens serta memiliki legitimasi oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat. Sehingga pembaca berpikir bahwa pemberitaan ini telah diuji kebenarannya oleh tokoh masyarakat tersebut

Akun-akun yang menyebarluaskan kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 tidak lepas dari pemberitaan yang bermuatan propaganda yakni bahwa pemberitaan propaganda hanya memiliki tujuan memenangkan hati massa. Seperti yang dilakukan oleh akun-akun penyebar kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 yakni mereka menginginkan dukungan dari massa dan melakukan pemberitaan yang provokatif.

Saluran-saluran penyampaian informasi bukan hanya dilakukan melalui akun pribadi atau grup saja melainkan fasilitas tagar (#) dalam media sosial *instagram*, *facebook*, dan *twitter* pun menjadi salah satu saluran dalam menyebarluaskan informasi yang provokatif.

kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 sedikit banyak mempraktikkan teori komunikasi politik yang mana melalui media sosial mereka dapat memengaruhi pembaca melalui konten yang disebar. Selain itu, intensitas dan banyaknya akun dalam penyebaran kampanye hitam dan ujaran kebencian juga sangat memengaruhi pembaca dalam keberpihakan. Penyebarluasan kampanye hitam dan ujaran kebencian juga dilakukan dengan cara melegitimasi informasi melalui tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga informasi tersebut bagi pembaca adalah informasi yang benar kenyataannya.

## **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian dalam Pilpres 2019**

Kampanye hitam dan ujaran kebencian pada Pilpres 2019 secara khusus tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci maupun kejadiannya pada zaman Nabi maupun zaman Khulafahu Rasyidin. Hal ini dikarenakan pada saat itu pemilihan Khulafahu Rasyidin berbeda dengan metode pemilu yang sekarang kita kenal. Pemilu yang dikenal pada masa Khulafahu Rasyidin dikenal dengan metode baiat atau janji setia dari masing-masing khalifah yang terpilih. Proses pemilihan tersebut dilakukan di masjid kemudian rakyat memberikan baiat kepada khalifah, sehingga disini tidak ada proses kampanye yang memungkinkan terjadinya kampanye hitam dan ujaran kebencian sebagaimana metode pemilu yang kita kenal sekarang.

Kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 menurut hukum Islam termasuk dalam perbuatan ghibah dan fitnah atau memperpincangkan dan mengumbar kejelekan orang lain yang belum jelas kebenarannya. Kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 merupakan perbuatan yang tidak jujur dan tidak mendidik, serta dalam fiqh jinayah termasuk ke dalam jarimah ta'zir yang hukumnya sudah ditentukan oleh penguasa atau yang lebih kita kenal sekarang adalah hakim dengan ijtihadnya berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.



Definisi ini merujuk pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ : أَعْلَمُ، قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَقِيلَ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَهُ

Artinya: “Rasulullah bertanya kepada para sahabat tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)?”. “Para sahabat menjawab”: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu”. “Kemudian beliau Rasulullah Saw bersabda”: “Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci”. Ada yang bertanya. “Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?”. “Beliau Rasulullah Saw menjawab”: “Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)”.

Islam, membenci segala bentuk perbuatan tercela seperti menghina, mengolok-olok, megumpat, menececi maki, dan segala macam perbuatan tercela lainnya. Islam juga sangat membenci semua orang yang membuat dosa, dan juga mengancam mereka dengan siksaan yang pedih di hari kiamat nanti dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang *fasik*.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Qalam ayat 10-12:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa”.

Ayat Al-Qur'an tersebut menerangkan perihal perbuatan yang dilarang seperti fitnah dapat merusak perilaku yang baik dan apabila melampaui apa yang telah dibataskan maka banyaklah dosa bagi siapa saja yang melakukannya. Jelaslah bahwa perbuatan fitnah merupakan perbuatan yang sangatlah ditentang oleh Allah SWT.

Islam adalah agama yang sangat mengharamkan perbuatan menggunjing, dan juga menebar kebencian, Allah SWT. sangat membenci dan juga menentang perbuatan tersebut dan menyebutnya sebagai sifat dan perbuatan tidak bermoral. Nabi SAW. bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ أَرْكَامٍ؟” قَالُوا: بَلَى. قَالَ: الْمَشَّاوُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمَفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ ( العنت “ . (أخرجه البخاري في الأدب المفرد

Artinya: “Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Mereka menjawab : Ya, kami mau. Nabi mengatakan : ialah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.” (HR. Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad)

Kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019 yang dikenal juga sebagai fitnah dalam Islam, merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk mencemarkan nama baik seseorang. Dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatan ini ialah keluarnya penyakit syirik, kikir, angkuh, dan dapat menyebabkan penderitaan yang lainnya.

Jadi, jelaslah dalam pandangan hukum Islam kampanye hitam dan

ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 hukumnya haram karena di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dari penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola kampanye hitam dan ujaran kebencian pada dasarnya dapat diidentifikasi. Karena akun penyebar kampanye hitam dan ujaran kebencian selalu memiliki pola penyebarluasan berita yang sama. Pertama, pengenalan massa. Akun pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian sangat mengenali pengguna media sosial aktif yaitu mayoritas anak muda atau sekitar 15-60 tahun. Kedua, penyebar pemberitaan kampanye hitam dan ujaran kebencian selalu memberikan pemberitaan yang berulang. Sehingga satu topik bisa menjadi beberapa bagian pemberitaan dengan tujuan mengingatkan kembali kepada masyarakat akan kelemahan seseorang. Ketiga, legitimasi. Legitimasi bisa menjadi salah satu bukti agar pemberitaan yang belum tentu kebenarannya dipercaya oleh masyarakat. Legitimasi dapat berupa bukti foto atau video.
2. Kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam pilpres 2019 yang dikenal juga sebagai fitnah dalam Islam, merupakan perbuatan yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang untuk menjatuhkan lawan dan juga untuk mencemarkan nama baik seseorang. Jadi, jelaslah dalam pandangan

hukum Islam kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam Pilpres 2019 hukumnya haram karena di dalamnya terdapat upaya untuk mendapatkan dukungan dengan cara mengungkapkan kejelekan atau aib orang lain yang tidak berdasarkan fakta dan perbuatan ini jelas akan mendatangkan kemudharatan. Membicarakan keburukkan yang memang benar adanya saja dilarang, terlebih keburukkan tersebut tidak benar adanya. Bahkan ghibah dan fitnah termasuk dosa besar karena Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya yang disebutkan ketika dia tidak ada, meskipun perkataan itu benar. Syari'at Islam menentukan hukuman tersendiri dalam rangka menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun kehormatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang sudah dikaji, penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi kemajuan politik, yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah dapat mempertimbangkan hukum Islam dalam menanggulangi kampanye hitam dan ujaran kebencian dalam masyarakat karena, kampanye hitam dan ujaran kebencian semakin menunjukkan taringnya terlebih dalam pelaksanaan pemilu khususnya pada Pilpres 2019.

2. Diharapkan kepada masyarakat supaya dapat memahami dan mengerti akan pentingnya politik dan juga hukum untuk menambah pengetahuan masyarakat supaya mentaati hukum, sehingga nantinya tidak akan berani melakukan kejahatan kampanye hitam dan ujaran kebencian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2005. *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Remadja Karya
- Alamsyah. 2015. *Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam*, dalam Jurnal *Al- 'Adalah*
- Al-Bukhari. 2005. *Al Jami Al Shahih, Juz V*, Beirut: Dar Al-Fikr
- Al-Farmawi AH. 2009. *Al-Mausu'ah al-Quraniah al-Mutakhassisah*, Kairo: Al-Majlis al- 'Ala li al-Syu'un al-Islamiyah
- Anam MC dan Hafiz M. 2015. *SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal *Keamanan Nasional*
- An Nawawi SY. 1433 H. *Al Adzkar An Nawawiyah*, Dar Ibni Hazm
- An Nawawi SY. 1433 H. *Syarh Shahih Muslim*, Dar Ibni Hazm
- A Partanto Pius dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola
- Ar-Razi AH. 2005. *Mukhtasar as-Shihah*, Beirut: Dar al- Ma'rifah
- Arifin A. 2014. *Politik Pencitraan, Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, SL. 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPNS
- Aulia. 2014. *Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa*, dalam Jurnal *Hukum*
- Buzama Khoiruddin. 2012. *Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal *Al- 'Adalah*
- Damai, Tegal. 2018 *Penyebab Terjadinya Kampanye Hitam (Black Campaign) di* <https://tegaldamai.wordpress.com/2018/03/08/penyebab-terjadinya-kampanye-hitam-black-campaign-2/> (akses 12Desember 2018)



- Danial Akhmad. 2009. *Iklan Politik TV Modernisasi Kampanye Politik Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta
- Darmawan MK. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkenleema
- Hanafi Ahmad. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang
- H Laswell. 1927. *Propaganda Technique in the World War*, New York: Peter Smith
- Ibn Manzur Muhammad. *Lisan al-Arab*, Jilid I, Beirut: Dar Shadir
- Jordan, Ricky. 2018. *Hoax, Hate Speech, dan Badan Cyber Nasional* di <http://hmip.fisip.ui.ac.d/hoax-hate-speech-dan-badan-cyber-nasional/> (akses 06 Desember 2018)
- Jurdi, F. 2018 *Pengantar Hukum Pemilahan Umum*. Jakarta: Kencana
- Khalaf AW. 1963. *Ilmu Ushul Fiqh*, Al-Dar Al-Kuwaiyah
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015.. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* Jakarta: Komnas Ham
- Lamintang PAF dan Lamintang Theo. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmudah Siti. 2012. *Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, dalam Jurnal Al- 'Adalah
- Manzhur Ibnu. *Lisna al- 'Arab*, Dar al-Ma'arif
- Marbun Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Visi Media
- Mawarti,S. 2018 *Media Komunikasi Umat Beragama*, dalam jurnal *Fenomena Hate Speech*
- Mufida. 2014. *Kampanye dan Pemilu*, Semarang: IKIP PGRI
- Muhammad, AK. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Muzakir. 2004.. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Jakarta: Dictum
- Naryosao Agus. 2008. *Majalah Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, dalam *Jurnal Universitas Diponegoro*
- Natapraja. 2016. *Analisis Black Campaign (Kampanye Hitam)*, dalam *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*
- Qardhawi Yusuf. 2000. *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press
- Rahardjo, S. 2002. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Departemen Kehakiman. Jakarta: Sinar Baru
- Raharjo, A. 2002 *Cybercrime*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rauf Maswadi. 2000. *Konsensus Politik: Sebuah Penjagaan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Riswandha Imawan. 1997. *Membedah Politik Orba*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ruslan Rosadi. 2013. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sangaji, EM. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sardini NH. 2015. *Rasionalitas Pilkada*, Jakarta: Suara merdeka
- Satrio J. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Setianti, Y. 2008 *Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak*. Bandung: Alumni
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soesilo R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea
- Syarifuddin, A. 1987. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wahana Ilmu
- Sugiono.2009. *Metode Penelitian Bisnis*. cetakan ke14. Bandung: Alfabeta

Suryabrata, S. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali

Thaib Lukman. 1998. *Politik Menurut Prespektif Islam*, Malaysia: Synergymate Sdn

Umar MH. 2014. *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada dalam Perspektif Fiqh Siyasi*, dalam Jurnal Al- 'Adalah

Winasis, AP. 2018 *Penanggulangan Kampanye Hitam Sebagai Hambatan Demokrasi di Era Disrupsi Teknologi Informasi*, dalam jurnal Unnes

Yusuf Imaning. 2009. *Fiqh Jinayah I*, Palembang: Rafah Press

Zen HR. 2015. *Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif*, dalam Jurnal Al- 'Adalah

